

Novel dan Kritik Politik Luar Negeri (Studi Sastra Realis Historis *Al-Zaynī Barakāt* Karya Al- Ghitani)

Muhammad Isya¹

Abstrak

Penelitian ini ini membuktikan bahwa salah satu kritik politik Novelis al-Ghitani di dalam novel al-Zayni> Baraka>t ialah kritikan terhadap kinerja Presiden Nasser atas kekalahan Arab pada perang Arab-Israel tahun 1967. Menurutnya, pemerintah ini terlalu disibukkan dengan memperbaiki internal Mesir sehingga kurang memperhatikan eskternal. Dengan kata lain, sepanjang tahun 1960-an, Presiden terlalu disibukkan dengan penanaman pan-Arabisme sehingga kurang dalam persiapan dan perencanaan melawan Israel tahun 1967.

Kata kunci: novel al-Zayn- Baraka-t, sosiologi sastra Terry Eagleton, Politik Luar Negeri, Perang Enam Hari.

Abstract

This research this proves that one of the criticisms of the political Novelist al-Ghitani in novel Zayni al-Baraka is the criticism of the performance of President Nasser over the defeat of the Arabs in the Arab-Israel war of 1967. According to him, the Government is too preoccupied with internal fix Egypt so little regard for external. In other words, throughout the 1960s, the President is too preoccupied with planting of pan-Arabism so lacking in preparation and planning against Israel in 1967.

Keyword: Zain- novel al-Baraka-t, sociology of literature Terry Eagleton, Foreign Policy, the Six Day War.

¹ Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab

A. Pendahuluan

Istilah sastra dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-adab* dan bentuk pluralnya *al-a>da>b*, yaitu kumpulan teks-teks tertulis yang terkandung di dalamnya ide-ide berupa karangan atau seni tulisan.² Defenisi ini tidak jauh berbeda dengan sastra Indonesia, yaitu suatu tulisan berupa puisi atau prosa dan nilainya sangat tergantung dengan ekspresi jiwa serta kedalaman pikiran manusia.³ Meskipun demikian, sebagaimana yang dijelaskan Sukron Kamil, dalam perkembangan sastra Arab sendiri mulai dari Jahiliah hingga sekarang, makna *al-adab* mengalami perkembangan.⁴ Adapun pengertian istilah ini semakna dengan istilah *al-adab* yang dikenal sekarang mulai dikenal pada abad ketiga Hijriah atau sekitar abad kesepuluh atau sebelas tahun Masehi. Mulai saat itu, sastra diartikan dengan bahasa tulisan atau pun lisan yang memiliki nilai estetika, baik dari bentuk dan isinya.

Menariknya, selain dari memiliki nilai estetika, sastra juga memiliki nilai politik.⁵ Sebabnya, sebagaimana

pendapatnya Prasetya Utama (1993), meskipun karya sastra itu hasil dari kemampuan khayal dan imajinasi sastrawan, tetapi ia juga tidak akan mungkin bebas dari ideologi politik tertentu. Sebagai seorang sastrawan dan bagian dari masyarakat umum, tentunya tidak akan dapat menolak realitas kehidupan sehari-hari yang dilalui, sehingga mempengaruhi kegiatan kreativitasnya.⁶ Selain dari itu, dalam relasi sastra dan politik, sebagaimana penjelasan Irving Howe (1967) atas pendapatnya Stendhal (1833-1841), novelis Prancis, bahwa politik dalam karya sastra bagaikan letusan pistol di tengah-tengah pagelaran konser. Dalam hal ini, meskipun letusan itu terdengar keras dan dinilai kumpang, tetapi mau tidak mau orang-orang di sekitarnya pasti memperhatikan.⁷

Demikian juga halnya dengan sastra Arab, relasi sastra dan politik itu sangat kuat, meskipun pada jenis-jenis prosa sebelumnya belum mengenal novel. Sebut saja misalnya pada prosa era Bani>Umayyah, terlihat pada khutbahnya (salah satu jenis karya prosa) sudah mengandung nilai-nilai politik. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan H}anna>

²H}anna> al-Fa>khu>ri>, *Ta>ri>kh al-Adab al-'Arabi>* (tt: al-Maktabah al-Bu>lisiyah, 1987), 33.

³Abdul Razak Zaidan (ed.), *Kamus Istilah Sastra* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 180.

⁴Pada masa Jahiliah, kata ini selain dari bermakna akhlak baik, juga bermakna mengajak makan. Pada masa awal Islam (610 – 661 M), istilah tersebut dimaknai dengan pendidikan bahasa dan akhlak. Barulah pada masa Umayyah (661 – 750 M) lebih agak mirip dengan makna sastra yang dikenal sekarang, yaitu pengajaran puisi, orasi dan sejarah Arab. Adapun perkembangannya pada masa Abbasiyah, masih semakna dengan *al-adab* pada masa Umayyah seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja, istilah itu tidak hanya sebatas pengajaran seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi juga pengajaran bicara dan nasehat, sebanding dengan pemahaman ilmu humaniora saat ini. Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4.

⁵Di Indonesia, wacana tentang sastra dan politik, pernah muncul dua kali. *Pertama*, terjadi pada tahun 1960-an, terutama setelah berdirinya Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) tanggal 17 Agustus 1950 atas inisiatif tokoh utama PKI, D.N. Aidit, Njoto, M.S. Ashar, dan A.S. Dharta. Para

sastrawan yang bergabung dengannya menerima metode realisme sosialis dengan keyakinan bahwa politik itu panglima. Selain dari itu, mereka berpemahaman “seni untuk rakyat” dan menolak “seni untuk seni.” Di antara para sastrawan dan kritikus sastra periode ini yang terkenal adalah Bakri Siregar, Boejoeng Saleh Poeradisastra, Joebaar Ajob, Klara Akustia, Hr. Bandaharo, dan Pramodya Ananta Toer. *Kedua*, terjadi pada tahun 1980-an atau periode kritik sastra akademik, yaitu ketika Arief Budiman dan Ariel Heryanto, alumni Universitas Satya Wacana Salatiga, mengemukakan tentang sastra kontekstual. Sastra kontekstual ini menganggap sastra itu tidak akan terlepas dari kepentingan politik tertentu. Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern*, 120-122. Rachmat Djoko Pradopo, *Kritik Sastra Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 160-162 dan 248.

⁶Prasetya Utama, *Sastra dan Politik* (Jakarta: Universitas Trisakti, 1993), 11-13.

⁷Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern*, 116.

al-Fa>khu>ri> (1987) ialah khutbah al-Bitra>' karya Abu> al-Mughi>rah Ziya>d bin Sumayyah atau lebih dikenal dengan Ziya>d Ibn Abi>h (53 H/ 673 M). Khutbah ini lebih mirip dengan statemen menteri untuk tujuan kekuasaan. Demikian juga dengan penjelasan tersebut bertujuan meredam segala bentuk pemberontakan dan fitnah sehingga membuat masyarakat menjadi tunduk dan patuh dengan khalifah.⁸

Dalam jenis sastra novel, sebut saja misalnya novel *al-Zayni> Baraka>t* karya Gamal al-Ghitani (1945-2015), menurut beberapa kritikus sastra, ia bagian kritik politik pengarang dalam menyikapi kondisi masanya. Hal itu diperkuat oleh pendapatnya Roger Allen (1995) peneliti dari Universitas Pennsylvania-Amerika dan Sabry Hafez (1989) peneliti dari Universitas London-Inggris, novel *al-Zayni> Baraka>t* merupakan novel historis, menceritakan fenomena akhir Dinasti Mamluk⁹ di Mesir dan ditujukan mengkritik sejarah politik Mesir sesudah 1952.¹⁰ Demikian juga pendapat al-Ja>bi>ri> (2011), novel tersebut mengkritik ideologi politik Mesir tahun 1960-an dan 1970-an dan menyamakan

dengan sejarah politik akhir Dinasti Mamluk tahun 1517."¹¹

Novelis Gamal al-Ghitani lahir pada tanggal 9 Mei 1945, yaitu setelah Perang Dunia II (1939-1945). Melihat dari kondisi Mesir waktu itu, tokoh ini merupakan novelis Arab dari generasi muda dan juga bagian dari "anak-anak *revolusi* Mesir." Tidak heran bahwa terlihat pada tulisan al-Ghitani tercermin semacam reaksi terhadap kondisi sejarah. Bahkan, atas karya-karyanya tersebut, ia ditangkap dan dituduh sebagai anggota kelompok Marxis ilegal, serta ditahan selama enam bulan antara Oktober 1966 dan Maret 1967. Jadi, pengalamannya di tahanan; kekalahan Israel pasukan Arab dalam Perang Juni 1967; dan runtuhnya kekuasaan Nasserisme bersama dengan semua itu dilambangkan di dalam novel *al-Zayni> Baraka>t*.¹²

Dari beberapa penjelasan di atas, sangat menarik novel *al-Zayni> Baraka>t* perlu dikaji lebih dalam, khususnya melihat pandangan Novelis merespon kekalahan Arab pada "Perang Enam Hari" tahun 1967. Mirisnya, meskipun di Indonesia novel ini sudah diterjemahkan pada tahun 2013 oleh Nadiyah Alwi, tapi belum ada yang meneliti secara khusus tentang hubungannya dengan politik. Padahal, mulai dari tahun 1989¹³ hingga sekarang, novel ini menjadi bahan kajian yang menarik. Bahkan, ketika awal novel ini

⁸H{anna> al-Fa>khu>ri>, *Ta>ri>kh al-Adab al-'Arabi>*, 328.

⁹المملوك adalah kata tunggal berasal dari kata ملك dan pluralnya المملوك. Bentuk kata ini adalah *Ism Maf'u>l* yang secara istilah artinya kumpulan budak-budak, didapatkan dari tawanan perang maupun yang dibeli, serta dilatih sesuai standar militer. Sa'i>d 'Abd al-Fatta>h} 'A<shu>r, *al-'As>r al-Mama>li>ki> fi> Mis>r wa-al-Sha>m* (Kairo: Da>r al-Nahd}ah al-'Arabiah, 1976), 1.

¹⁰Roger Allen, review of *Egyptian Writers Between History and Fiction: Essays on Naguib Mahfouz, Sonallah Ibrahim & Gamal al-Ghitani*, by Samia Mehrez, *Middle East Studies Association Bulletin*, Vol. 29, No. 1 (1995), 126-127, <http://www.jstor.org/stable/23061288> (diakses 4 Juni 2014). Lihat juga Sabry Hafez, review of *Touching on Taboos Zayni Barakat* by Gamal al-Ghitani; Farouk Abdel-Wahab, *Third World Quarterly*, Vol. 11, No. 4 (1989), 307, <http://www.jstor.org/stable/3992355> (diakses 4 Juni 2014).

¹¹Mutaqaddam al-Jābirī, "Jama>liyāt al-Ta'āluq al-Nas>s}ī fi Riwayāt "al-Zaynī al-Barakāt" li-Jamāl al-Ghīt}ānī," *Majallat Kullīyat al-Ādāb wa-al-Lughāh*, Vol. 8, tn (2011), 2-4, http://fll.univ-biskra.dz/images/pdf_revue/pdf_revue_08/metakadem%20djebairi.pdf (diakses 18 Mei 2014).

¹²Maman Lesmana, "Learning History from Novel: A Case Study in Arabic Literature," *Tawarikh*, Vol. 6, No. 1 (2014), 89-90, http://tawarikh-journal.com/wp-content/uploads/1970/01/08.males_.ui_id_.10.14.pdf (diakses 11 Maret 2015). Angelika Neuwirth (ed.), *Arabic Literature Postmodern Perspectives* (London: Saqi, 2010), 147.

¹³Sabry Hafez, review of *Touching on Taboos Zayni Barakat* by Gamal al-Ghitani; Farouk Abdel-Wahab, 305-308.

diterjemahkan dan diteliti oleh Samia Mehrez: *Bricolage as Hypertextuality* (Universitas California, Los Angeles, 1985).¹⁴

B. Pembahasan

1. Kerangka Teoritik

Sastra Arab, layaknya sastra umum juga merupakan produk pikiran dan perasaan sastrawan. Hanya saja, tidak mudah bagi sastra Arab berdialog dengan teori Barat. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya sastra Arab banyak yang bernuansa Islam sedangkan teori Barat masih bersifat umum. Khususnya teori sosiologi sastra Terry Eagleton yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan teori Neomarxis, sedangkan teori Marxis sendiri berasal dari filsafat Marxisisme yang cenderung dijauhi oleh penulis sastra Arab.¹⁵ Untuk itu, perlu adanya pengenalan khusus terhadap teori sosiologi sastra secara umum dan perspektif Terry Eagleton.

Sosiologi sastra berasal dari teori *mimesis* Plato (428-328 SM) yang menganggap sastra merupakan representasi murni dari realitas. Setelah Plato, konsep *mimesis* ini dikembangkan muridnya, Aristoteles (384-322 SM), yang menganggap sastra tidak hanya representasi murni dari realitas, tetapi juga model baru yang diciptakan sastrawan berdasarkan kreatifitasnya. Barulah pada abad ke-18, kedua teori tersebut mulai dikembangkan lagi oleh kritikus naturalis asal Prancis, Hypolite Taine (1766-1817), dan sebagai peletak dasar teori sosiologi sastra modern. Menurutnya, karya sastra itu

dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu ras (sesuatu yang diwarisi manusia di dalam jiwanya), lingkungan dan momen (*setting* sosial politik pada masa itu).¹⁶ Bahkan, menurut Taine yang dikutip oleh René Wellek (1959), apabila ketiga hal itu dapat diukur dan diuraikan, maka akan dapat disimpulkan karakteristik peradaban masa depan dan ketika ketiga hal itu dipertimbangkan, bukan hanya akan tergambar realitas, tetapi semua kemungkinan dari faktor penyebabnya.¹⁷

2. Teori Sosiologi Sastra Terry Eagleton

Terry Eagleton merupakan salah satu kritikus Neo-Marxis, menghidupkan kembali teori Marxis. Salah satu bukunya yang terkenal "*Marxis and Literary Criticism* (1976)." Secara umum, model teori Marxis atau lazim disebut "sosiologi sastra" adalah analisis terhadap sastra melalui kajian terhadap produksi sastra tersebut, distribusinya, bagaimana ia diterbitkan, komposisi sastrawan dan pembaca, tingkatan melek huruf, dan determinan sosial. Namun, teori Marxis tidak hanya memfokuskan pada unsur itu, tetapi bentuk, gaya dan makna teks juga menjadi perhatian. Artinya, kritik "sosiologi sastra" tidak hanya fokus pada unsur intrinsik sastra, tetapi juga memahami unsur ekstrinsik (teks), karena teks itu sendiri merupakan hasil produk sejarah masanya. Eagleton mengutip pendapat Henri Matisse, semua seni menyanggah jejak sejarah zamannya dan seni yang besar adalah seni yang mengandung sejarah secara mendalam.¹⁸

Hal itu disebabkan karena dinamika sejarah dan sastra sendiri saling melengkapi, terutama keduanya

¹⁴Akan tetapi, fokus kajian ini pada struktural dari tiga fiksi al-Ghitani: *al-Zayni Baraka>t, Mawqi' Ha{>rah al-Za'fara>ni>, and Khit}at} al-Ghitani*. Samia Mehrez, *Egyptian Writers between History and Fiction: Essay on Naguib Mahfouz, Sonallah Ibrahim, and Gamal al-Ghitani* (Kairo: The American University in Cairo Press, 2005), 154.

¹⁵Fadlil Munawwar Manshur, "Teori Sastra Marxis dan Aplikasinya pada Penelitian Karya Sastra Arab," *Bahasa dan Seni*, Vol. 40, No. 1 (2012), 123-122, <http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/11-Fadlil-Munawwar.pdf> (diakses 26 April 2015).

¹⁶Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern*, 113-114.

¹⁷René Wellek, "Hippolyte Taine's Literary Theory and Criticism," *Criticism*, Vol. 1, No. 1 (1959), 1-3,

<http://www.jstor.org/stable/23091097> (diakses 19 Februari 2015).

¹⁸Terry Eagleton, *Marxis and Literary Criticism* (London: Taylor & Francis e-Library, 2006), 1-2.

menjaring totalitas dari proses sosial. Walau bagaimana pun, sejarah merupakan catatan kompleks tentang perubahan manusia dari masyarakat yang primitif hingga sekarang: *History is a record of the complex manner in which human society has transformed from its primitive stage to the present.*¹⁹ Namun, pada prosesnya, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh intervensi ideologi tertentu. Hanya saja, menurut kritik sastra Marxis, ideologi yang ditampilkan di teks sastra itu (1) ada yang menampilkan secara natural sesuai dengan ideologi masanya dan (2) ada juga yang bertentangan. Dalam tujuannya, yang pertama tidak menentang struktur yang ada dan hubungannya dengan kekuasaan, sementara yang kedua mendorong perjuangan ideologis dengan maksud menggoncang hubungan kekuasaan dan menciptakan transformasi sosial.²⁰

Jika melihat latar belakang pemikiran Eagleton (kritikus Inggris era 1970-an), Eagleton dan pengikut Marx lainnya, sedikit atau banyak, dipengaruhi oleh pemikiran Louis Althusser (1918-1990), seorang kritikus asal Perancis. Salah satu konsep kunci Althusser ini tentang konsep "ideologi." Menurutnya, ideologi merupakan sistem dari representasi di dalam masyarakat.²¹ Konsep ideologi ini juga yang digunakan dan dikembangkan oleh Eagleton dalam teorinya. Menurutnya, ideologi itu bisa berwujud hukum, politik, agama, etika, estetika dan sebagainya dengan fungsi melegitimasi kekuasaan kelas penguasa dalam masyarakat.²²

¹⁹K. N. Panikkar, "Literature as History of Social Change," *Social Scientist*, Vol. 40, No. 3/4 (2012), 4, <http://www.jstor.org/stable/41633799> (diakses 13 Februari 2015).

²⁰K. N. Panikkar, "Literature as History of Social Change," *Social Scientist* 3/4 (2012), 6.

²¹Peter Barry. Peter Barry, *Beginning Theory, an Introduction to Literary and Cultural Theory* (Manchester: Manchester University Press, 1995), 110.

²²Terry Eagleton, *Marxism and Literary Criticism*, 2.

Eagleton mengutip pendapat Engels, sastra memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan ideologi dibandingkan teori politik dan hukum. Bahkan, sastra lebih transparan mewujudkan kelas penguasa. Sebagai kritikus Neomarxis, Eagleton mengembangkan lagi teori Marxis yang mengatakan karya sastra itu hanyalah refleksi ideologi yang dominan. Tegasnya, sastra tidak hanya bersifat pasif mencerminkan ideologi, tetapi membuat kita juga "merasa" dan "merasakan" ideologi tersebut.²³ Dengan demikian, karya sastra merupakan bentuk persepsi dan sebagai salah satu metode untuk melihat "mentalitas sosial" atau ideologi di masanya.²⁴

Untuk memahami ideologi (khususnya politik) melalui karya sastra, tidak cukup hanya melakukan penafsiran secara simbolis, tetapi mesti mempelajari sejarah sastra dulu dan menambahkan catatan tentang fakta sosiologis yang masuk ke dalamnya. Dalam artian, langkah ini adalah pemahaman terhadap hubungan tidak langsung antara karya sastra dan ideologi. Hubungan itu tidak hanya muncul di tema dan *preoccupations* (keasyikan) sastra, tetapi juga muncul dalam gaya, irama, gambar, kualitas dan bentuk. Kemudian, peneliti tidak akan memahami ideologi dengan baik, kecuali memahami dulu ideologi masyarakat secara keseluruhan. Untuk memahami ideologi itu, peneliti harus menganalisis hubungan yang tepat diantara kelas yang berbeda dan memahami mana kelas-kelas yang ada kaitannya dengan produksi karya sastra.²⁵

Perlu diingat bahwa kajian terhadap unsur "dalam" teks bukanlah menjadi fokus utama dalam penelitian ini sebagaimana dalam teori struktural genetik, yaitu teori kritik yang melihat sastra berdasarkan dua unsur: intrinsik dan ekstrinsiknya. Justru,

²³Terry Eagleton, *Marxism and Literary Criticism*, 9.

²⁴Terry Eagleton, *Marxism and Literary Criticism*, 3. Lihat juga K. N. Panikkar, "Literature as History of Social Change," 5-6.

²⁵Terry Eagleton, *Marxism and Literary Criticism*, 3.

sosiologi sastra hanya sebatas mencari kritik politik yang berada di teks dan dihubungkan dengan konteks sosial-politik di zamannya. Menurut Eagleton, ada dua cara utama dalam teori sosiologi sastra. Cara pertama adalah realis: sastra sebenarnya sangat dikondisikan oleh konteks sosial dan oleh karenanya, setiap teori yang mengabaikan fakta ini, secara otomatis defisien. Cara kedua ialah pragmatis: sastra sebenarnya dibentuk oleh berbagai faktor dan dibaca dalam berbagai konteks, menyoroiti faktor determinan sosial juga perlu berdasarkan sudut pandang politik tertentu.²⁶

3. Teori Politik Luar Negeri Sebagai Teori Bantu Teori Terry Eagleton

Menurut Sadia Mushtaq (asisten doktor pada Fakultas Ilmu Politik GC Universitas Lahore, Pakistan) dan Ishtiaq Ahmad Choudhry (Profesor dan Dekan Fakultas Studi Perdamaian dan Konflik, Universitas Pertahanan Nasional, Islamabad-Pakistan), definisi politik luar negeri atau *Foreign Policy* ialah:

*Foreign policy is a behavioral pattern, which states adopt to conduct foreign and diplomatic relations with other states of the world. It is formulated according to well-defined national interests*²⁷ (Politik luar negeri adalah pola perilaku, yang mana negara melakukan hubungan luar negeri dan diplomasi dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini dirumuskan sesuai dengan kepentingan nasional yang jelas).

Namun, dalam prosesnya, hal ini ditentukan juga oleh elemen internal

negara atau dalam bahasanya Hans J. Morgenthau (1948) adalah kekuatan nasional (*national power*). Secara tidak langsung, jika hal itu diperhitungkan, maka tidak sulit mewujudkannya. Adapun elemen itu meliputi: *geography* (geografi), *natural resources* (sumber daya alam), *industrial capacity* (kapasitas industri), *military preparedness* (kekuatan militer), *population* (populasi), *national character* (karakter nasional), *national morale* (moral nasional), *the quality of diplomacy* (kualitas diplomasi), dan kualitas pemerintah.²⁸ Elemen ini juga yang disebutkan Sadia Mushtaq dan Ishtiaq Ahmad Choudhry lokasi geopolitik dan geo-strategis negara, sumber daya ekonomi, persepsi kognitif dan psikologis pemimpin dan krisis internasional.²⁹

Dari delapan elemen tersebut, di sini hanya akan dibahas tentang sumber daya alam kekuatan militer (kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata), moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah (masalah dukungan rakyat). *Pertama*, dalam istilah ekonomi, kemampuan poin ini akan memainkan peran penting di dalam politik luar negeri (dalam bahasanya William D. Coplin dimensi kemampuan ekonomi)³⁰. Misalnya saja pada peperangan Jerman dan Inggris pasca PD II, terdapat tiga hal yang menjadi target penting Jerman, yaitu mempercepat peperangan agar kesediaan pangan tidak habis, menaklukkan daerah-daerah yang banyak menghasilkan pangan di bagian Eropa Timur dan menghancurkan kekuatan Inggris di laut karena menghalangi akses pangan Jerman dari sumber-sumber pangan di seberang

²⁶Terry Eagleton, "Two Approaches in the Sociology of Literature," *Critical Inquiry*, Vol. 14, No. 3 (1988), 469, <http://www.jstor.org/stable/1343699> (diakses 22 April 2015).

²⁷Sadia Mushtaq dan Ishtiaq Ahmad Choudhry, "Conceptualization of Foreign Policy An Analytical Analysis," *Berkeley Journal of Social Science*, Vol.3, no. 1 (2013), 1, <http://www.berkeleyjournalofsocialsciences.com/spring4.pdf> (diakses 15 Nopember 2015).

²⁸Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred A. Knopf, 1948), 80-108.

²⁹Sadia Mushtaq dan Ishtiaq Ahmad Choudhry, "Conceptualization of Foreign Policy An Analytical Analysis," 1.

³⁰William D. Coplin, *Introduction to International Politics*, terj. oleh Marsedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), 115.

laut. Akan tetapi, bagi Jerman, tiga hal inilah yang tidak tercapai, sehingga mendapati kekalahannya.³¹

Kedua, dalam istilah militer, kekuatan suatu negara ditentukan oleh kualitas orang dan senjata yang digunakan. Selain dari itu, yang pokok juga dalam poin ini adalah siasat dan teknik perang baru dari pimpinan militernya. *Ketiga*, moral nasional ialah kebulatan tekad suatu bangsa untuk mendukung politik luar negeri pemerintahnya. Moral ini dalam suatu negara menyebar pada setiap kegiatan negara, produksi pertanian dan industrinya, dan pranata militer maupun dinas diplomatiknya. *Keempat*, mengingat pentingnya diplomasi dalam politik ini, sehingga Hans J. Morgenthau mengatakan: *diplomacy, one might say, is the brains of national power, as national morale is its soul* (diplomasi, bisa dikatakan, adalah otak dari kekuatan nasional, moral nasional adalah jiwanya).³² *Kelima*, hal yang paling sulit dari semuanya adalah pemerintah dalam usaha politiknya harus memastikan terlebih dahulu persetujuan rakyatnya, sehingga terciptanya persatuan yang kokoh secara internal.³³

Demikian juga, dalam mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional, bukan berarti hanya fokus pada hal internal saja, tetapi juga eksternal. Terlalu memperhatikan elemen kekuatan negara sehingga mengesampingkan elemen luar juga bukanlah termasuk dalam kategori ini. Konsep politik luar negeri – melakukan

hubungan dengan negara lain – adalah hubungannya dengan eksternal, tetapi yang dimaksud dalam istilah ini ialah eksternal tersebut juga dipengaruhi oleh internal atau kekuatan negara. Dengan demikian, idealnya, pemerintah dalam melakukan politik model ini harus memperhatikan dua unsur, yaitu sikap dan tindakannya terhadap kehidupan internal dan kebutuhan bangsa secara eksternal.³⁴

Pandangan Politik Al-Ghitani Atas Kekalahan Arab Pada Perang Tahun 1967 Novel *al-Zayni > Baraka > t* ini terdiri dari 287 halaman (sudah termasuk dengan 2 halaman daftar isi) dan 7 seri. Sedangkan versi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia oleh Nadian Alwi menjadi 371 halaman dan termasuk dengan 1 halaman biografi penulis, Gamal al-Ghitani. Akan tetapi, novel ini tidak langsung diterjemahkan dari novel aslinya *al-Zayni > Baraka > t*, melainkan diterjemahkan dari buku terjemahan versi Inggrisnya *Zayni Barakat*, yaitu oleh penerbit Editions du Seuil tahun 1985, sebagaimana pertama kalinya novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sebagaimana pada versi terjemahan Inggrisnya terdapat pengantar dari Edwar Said, begitu juga dengan versi Indonesianya terdapat pengantar tersebut. Di dalam novel ini disebutkan bahwa ketika pengembara Venesia, Visconti Gianti, berkunjung ke Kairo pada tahun 1516 M, suasana Kairo lagi kacau, terutama setelah menghilangnya tokoh *al-Zayni > Baraka > t*. Seperti perkataannya:

أرى وجه المدينة مريضا يوشك على البكاء، امرأة مذعورة تخشى اغتصابها آخر الليل...³⁵

Artinya:

³¹Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred A. Knopf, 1948), 82.

³²Sebabnya, apabila bagian ini lemah, maka moral nasional pun ikut lemah, termasuk juga elemen kekuatan nasional lainnya tidak bermanfaat untuk negara. Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, 90, 100 dan 105.

³³Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, terj. oleh S. Maimoen, dkk., *Politik Antar Bangsa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 175.

³⁴Teuku May Rudy, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* (Bandung: Angkasa, 1993), 107.

³⁵Dalam istilah ilmu *balaghah* (*baya > n*) genre kalimat ini dikenal dengan *tashbih mu'akkad*, yaitu salah satu dari kategori *tashbih* yang dibuang 'adat *tashbih*-nya. Mamat Zaenuddin dan Yayan Nurbayan, *Pengantar Ilmu Balaghah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 23.

Aku melihat wajah Kairo (seperti) lagi sakit yang hampir saja menangis, ia (seperti) wanita lagi panik karena takut diperkosa di penghujung malam...

Rumah penduduk dikunci dan penghuninya ingin sekali cepat pindah dari tempat tersebut. Bahkan, Visconti Gianti sendiri merasa cemas karena takut dirampok oleh orang Mamluk. Menara Masjid yang dibangun Sultan al-Ghuri yang ia lihat sebelumnya pada tahun 1515 tidak ada lagi. Ia pun mendengar kabar bahwa banyak bangsawan dan shaykh telah meninggalkan rumah mereka, memindahkan harta mereka ke tempat yang jauh dan mengirim anaknya ke pinggiran kota.³⁶

Dalam sejarahnya, situasi yang digambarkan novelis, merupakan kondisi kemunduran Mamluk atas kekuatan politik eksternal baru, yaitu kerajaan 'Uthmani (selanjutnya akan disebut Ottoman). Kekuatan Mamluk *Burji* tidaklah sama dengan Mamluk *Bahri*, menurut Badri Yatim (1998), solidaritas sesama militernya kuat dan stabilitas negaranya aman dari gangguan luar, serta kepribadian dan wibawa Sultan yang tinggi.³⁷ Sedangkan Mamluk *Burji*, ketiga faktor itu menghilang, makanya Dinasti Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran.³⁸ Adapun novelis Gamal al-Ghitani melalui novel ini menggambarkan kembali kondisi sosial-politik akhir Mamluk dengan menampilkan perjuangan tokoh al-Zayni Barakat sebagai *Muhtasib*.³⁹

³⁶Gamal al-Ghitani, *al-Zaynī Barakāt* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1994), 7-8.

³⁷Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 128.

³⁸Selain dari itu, terdapat juga faktor lain penyebab kemunduran Mamluk, Ajid Thohir (2009) menyebutkan: karena perebutan kekuasaan, kemewahan dan korupsi di tingkat penguasa, merosotnya perekonomian. Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 130-132.

³⁹Dalam bahasa Arab, محتسب merupakan *ism al-fa'il* yang berasal dari kata احتسب yang artinya

Demikian juga, gambaran kekalahan Mamluk atas Ottoman merupakan kilas balik dari kekalahan Mesir melawan Israel tahun 1967.⁴⁰ Pada perang Arab-Israel tahun 1967, pasukan Israel dengan cepatnya menduduki Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat Yordania dan Dataran Tinggi Golan. Tepat pada tanggal 5 Juni 1967, pukul 7.45 pagi (waktu Israel), Angkatan Udara Israel menyerang pangkalan udara Mesir, Suriah, dan Yordania, serta menghancurkan 80% pesawat tempur UAR (*United Arab*

menganggap, memperhitungkan. Jadi arti محتسب adalah orang yang memperhitungkan atau bendaharawan, kasir. Akan tetapi, *Muhtasib* di sini diterjemahkan sebagai “pengawas pasar” atau “penyensor,” karena memang pemeriksaan pasar adalah salah satu tanggung jawab yang paling penting dari pejabat ini. Pada saat yang sama, termasuk tanggung jawab *muhtasib* juga untuk menjaga moralitas publik sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibn Khaldun, yaitu:

الحسبة فهي وظيفة دينية، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو فرض على القائم بأمر المسلمين...

Artinya:

Muhtasib ialah jabatan keagamaan yang berurusan dengan *amal ma'ru'f nahi munkar* (mengajak orang-orang berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat keburukan) dan berkewajiban mengurus persoalan kaum muslimin... Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 37 dan 1642. Elias A. Elias, *Modern Dictionary Arabic-English* (Egypt: Elias' Modern Press, 1954), 146. Adam Sabra, review of H{isba, Arts and Craft in Islam, by Ahmad Ghabin, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 22, No. 2 (2011), 252, doi:10.1093/jis/etr007 (diakses 3 Januari 2015). Al-'Alamah Wali al-Din 'Abd al-Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Damaskus: Dar Ya'rab, 2004), 407.

⁴⁰Pada dasarnya, antara perang Arab-Israel tahun 1967 dengan perang Mamluk-Ottoman 1517 adalah dua hal yang berbeda. Pada perang Arab-Israel, yang dihadapi tentara Islam adalah zionis sedangkan perang Mamluk-Ottoman itu yang dihadapi adalah Islam sendiri. Meskipun demikian, yang menjadi persamaan dalam maksud tersebut ialah sisi waktu pada perang keduanya dan sangat mudahnya tentara Islam itu terkalahkan oleh pasukan lawan.

Republic).⁴¹ Menurut Walter S. Jones (1988), terdapat empat hal yang terjadi akibat kekalahan tersebut. (1) Perbatasan dikuasai oleh Israel dan pertahanannya semakin kuat, (2) Yerusalem jatuh ke tangan kekuasaan Yahudi, (3) satu juta jiwa orang Arab Palestina di bawah kendali negara ini (akibatnya setengah dari penduduk Israel berasal dari Palestina⁴²) dan (4) Israel yang sebelumnya berada pada posisi bertahan, menjadi berkuasa atas sejumlah besar penduduk sipil Arab.⁴³

Idealnya, sebuah pemerintahan yang mempertahankan identitas geografis, legal dan nominalnya sebagai negara bangsa harus memperhatikan dua unsur, yang meliputi sikapnya dan tindakannya terhadap kehidupan internal dan kebutuhan bangsa secara eksternal.⁴⁴

⁴¹Ersun N. Kurtulus, "the Notion of a "Pre-emptive War:" the Six Day War Revisited," *Middle East Journal*, Vol. 61, No. 2 (Spring 2007), 220, <https://kar.kent.ac.uk/1547/1/Kurtulus.pdf> (diakses 4 September 2015).

⁴²Hingga sekarang, konflik Palestina dan Israel belum juga terselesaikan. Sebut saja pada Juni 2003, Presiden Amerika George W. Bush berusaha menengahi persoalan itu, yang didukung oleh Uni Eropa, Rusia dan PBB, tetapi tetap saja belum membuahkan hasil. Israel sering kali mengabaikan dan mengingkari atas kesepakatan perdamaian. Menurut Muhammad Gufran (2004), salah satu tokoh diplomat Indonesia, peran negara besar seperti yang telah disebutkan memang tidak bisa menghentikan pengingkaran Israel, karena atas kendala kekuatan tertentu yang cenderung berpihak padanya. A. Agus Sriyono (ed.), *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 101 dan 105.

⁴³Walter S. Jones, *the Logic of International Relations*, terj. oleh Budiono Kusumohamidjojo, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), 107.

⁴⁴Seperti halnya perjalanan bangsa Indonesia sehingga mendapatkan pengakuan internasional. Awalnya kemerdekaan 17 Agustus 1945 belum langsung memperoleh pengakuan itu, disebabkan Belanda dan sejumlah negara lain belum mengakui eksistensi negara. Dalam periode itu, dilakukan dua upaya oleh pemerintah Presiden Soekarno, diplomasi (bilateral dengan Belanda dan jalur PBB) dan kekuatan Militer melalui TNI

Dalam menggapai suatu tujuannya, negara juga harus memperhatikan situasi strategis, historis, politik, dan geografi. Jika dalam bahasanya Hans J. Morgenthau (1948), memperhatikan unsur-unsur kekuatan nasional. Menurutnya, unsur tersebut adalah hal penting yang harus tetap dipertimbangkan oleh politik luar negeri semua negara. Unsur inilah yang dikategorikannya sebagai unsur geografis, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.⁴⁵ Unsur-unsur inilah akan dilihat dalam novel ini, sehingga kekalahan pada "Perang Enam Hari" menjadi bahan renungan dan kritikan bagi sebagian kelompok Islam saat itu dan termasuk juga al-Ghitani.

Melalui perjuangan al-Zayni> dalam kisahnya terlihat bahwa pemerintah terlalu fokus pada masalah internal Mesir sehingga melupakan kekuatan eksternal (Ottoman) yang lebih besar, atau menurut Hans J. Morgenthau: *...not correlating the power of one nation to the power of other nations* (tidak menghubungkan kekuatan suatu negara terhadap negara lain). Sultan al-Ghu>ri> dalam peperangan pun terlalu meremehkan kekuatan lawan, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh pasukan Sali>m bin 'Uthma>n pada Minggu 25 Rajab 922 H. Yang pertama masuk medan pertempuran adalah al-Ata>bak Su>du>n, Malik al-Umara>' (Gubernur Damaskus), dan Mamluk al-Qara>s}inah. Dalam waktu singkat, al-Ata>bak Su>du>n dan Malik al-Umara>' terbunuh dalam pertempuran itu dan pasukan sayap kanan pun terkalahkan. Ketika sang Sultan yakin bahwa dia akan terkalahkan, ia pun

(Tentara Nasional Indonesia). Singkatnya, barulah pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar. A. Agus Sriyono (ed.), *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, 7.

⁴⁵Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred A. Knopf, 1948), 80-108.

menderita lumpuh pada pinggangnya hingga menyebabkan kekang kudanya terjatuh. Menurut kabar, empedunya pecah, darahnya mengalir dari leher dan tubuhnya tidak diketemukan.⁴⁶

Meskipun periode ini Sultan terlalu memperhatikan perbaikan urusan internal Mamluk, tetapi dapat dikatakan bahwa kekuatan nasional Dinasti ini juga lemah. Minimal, jika menggunakan teorinya Hans J. Morgenthau, terdapat tiga unsur yang menjadi kelemahan Dinasti ini, meliputi kesiagaan militer (kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata), moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah (masalah dukungan rakyat). Selain dari itu, kemampuan ekonomi negara ini juga lemah, padahal, hal itu menjadi sumber ketahanan negara atau dalam bahasanya William D. Coplin bahwa ini menjadi peran penting dalam politik luar negeri.⁴⁷

4. Kuantitas dan Kualitas Angkatan Bersenjata

Sisi ini bukan hanya melihat kualitas dan kuantitas perlengkapan alat perang, tetapi terkait juga dengan pasukannya dan pimpinan harus ahli dalam mengatur siasat terlebih jika memiliki teknik perang yang baru.⁴⁸ Namun, jika melihat sisi ini, pasukan Sultan itu lemah, dan bahkan Sultan sendiri tidak ahli dalam mengatur siasat. Hal ini berdasarkan yang diceritakan wakil al-Shiha>b Zakariyya> bahwa seharusnya yang pertama masuk ke medan perang bukan pasukan Mamluk al-Qara>s}inah, tetapi al-Julba>n. Memang pada awalnya, mereka dapat mengalahkan

pasukan Ottoman sehingga serangan itu memberikan dua pilihan pada pasukan lawan, melarikan diri atau menyerah. Akan tetapi, sebagaimana yang diperintahkan sang Sultan, pada pertempuran selanjutnya beliau hanya memerintahkan pasukan Mamluk al-Qara>s}inah dan pasukan Mamluk al-Julba>n tidak diikutsertakan. Akibatnya, hal itu melemahkan semangat yang bertempur dan menjadi sebab kekalahannya.⁴⁹

Termasuk juga pada periode Nasser, kekuatan Mesir persenjataan mereka terlihat lemah sekali dibandingkan dengan Israel, hanya dalam waktu yang singkat dimulai pukul 7.45 pagi, beberapa kawasan Mesir dan pangkalan UAR sudah. Meskipun yang bergabung dalam pan-Arabisme ada sejumlah negara (Mesir, Yordania, Suriah, Libanon dan Irak), tetapi dari kekuatan militer, Israel masih kuat terutama karena dibantu oleh Amerika dan Inggris. Meski Israel kalah dalam segi kuantitas pasukan, tetapi secara persenjataan, perlengkapan, strategi, dan disiplin, ia mengungguli UAR.⁵⁰ Memang, dalam ketahanan nasional, teknologi peperangan menjadi faktor penentu juga, bahkan ini diyakini tidak dapat diimbangi oleh kekuatan lain. Dari segi teknologi persenjataan, sepanjang masa ekspansi dari abad ke-15 hingga 19, Eropa lebih unggul dari Dunia Belahan Barat, Afrika, Timur Dekat, dan Timur Jauh. Dalam contoh kasus kota Hiroshima dan Nagasaki 6 Agustus 1945 (tahun kemerdekaan Indonesia), kekuatan senjata bom nuklir menjadikan negara tersebut hancur.⁵¹

⁴⁶Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 247-249.

⁴⁷William D. Coplin, *Introduction to International Politics*, terj. oleh Marsedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), 115.

⁴⁸Teks asli: *Its Military leaders may excel in the strategy and tactics appropriate to the new techniques of war* (Para pemimpin militer yang unggul dalam strategi dan taktik yang tepat untuk teknik baru dari perang). Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, 90.

⁴⁹Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 348.

⁵⁰Rahman Asmardika, "Perang Enam Hari 1967, Israel Kalahkan Negara Arab," *Okezone.com*, 5 Juni 2015, <http://news.okezone.com/read/2015/06/04/18/1160396/perang-enam-hari-1967-israel-kalahkan-negara-arab> (diakses 9 November 2015).

⁵¹Selamat Ginting, "Bom Atom dan Kemerdekaan RI," *Republika Online*, 12 Agustus 2014, <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/>

Moral Nasional (*National Morale*) dan Dukungan Rakyat

Dalam hal moral nasional – *the degree of determination with which a nation supports the foreign policies of its government in peace or war* (tingkat determinasi suatu bangsa untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dalam damai atau perang) – Dinasti ini kurang bagus. Hal ini terlihat dari beberapa petingginya yang berkomplot dengan pasukan musuh. Makanya, dalam cerita ini Zakariyya> kagum dengan kepala mata-mata Ottoman, karena mampu mengadakan kontak dengan sekelompok Amir Mamluk. Misalnya saja Amir Kha>yr Bak, salah seorang Amir terdekat Sultan yang termasuk di dalamnya. Meskipun demikian, Zakariyya> tidak memberitahu kepada Sultan, bukti itu akan digunakan untuk melawan Amir Kha>yr Bak ketika sewaktu-waktu Amir Kha>yr Bak menentangnya. Menurut catatan, kepala mata-mata Ottoman telah merekrut lebih dari seorang Amir dan termasuk Amir Kha>yr Bak.⁵²

Dalam hal lain, tingkat determinasi mereka yang kurang bagus terlihat pada perselisihan antar petinggi-petinggi pemerintah, seharusnya mereka mendukung Sultan, tetapi malah mementingkan kepentingan pribadi, terutama dalam hal kekuasaan. Menurut Ah}mad al-‘Usayri>, perselisihan tersebut menjadi sebab kehancuran Dinasti Mamluk sendiri. Kondisi mereka yang terpecah belah, terjadi konflik, dan banyak pertempuran menjadi salah satu pemicu kehancurannya.⁵³ Menurut al-

‘Usayri> juga, kebanyakan dari pemimpin-pemimpin Mamluk adalah orang yang lemah, sesama petinggi Mamluk memiliki sifat dengki, saling membenci, dan terjadi konspirasi. Jika ditelusuri, hal itu wajar karena salah satunya mereka datang dari wilayah yang berbeda-beda dan kurang saling mengenal. Ditambah lagi dengan ambisi mereka untuk berkuasa.⁵⁴

Perselisihan antara petinggi Sultan memang kerap terjadi. Hal itu disebabkan karena perebutan kekuasaan baik di tingkat Sultan sendiri maupun para Amir. Misalnya saja Sultan, Sultan yang baru saja dilantik berusaha mendapatkan dukungan dari Khalifah untuk menyelamatkan kedudukannya, meskipun dukungan Khalifah juga tidak menjamin, terutama jika terjadi pemberontakan oleh para Amir. Dalam melantik Sultan, Khalifah sendiri tidak mempunyai kekuasaan, Khalifah akan melantik Sultan apabila para Amir sudah menyetujui. Bahkan, apabila sang Khalifah pun tidak mau melantik Sultan yang telah disetujui, maka Khalifah berhadapan dengan pemecatan jabatannya.⁵⁵

Menurut Sa‘i>d al-Juhayni>, salah seorang mahasiswa al-Azhar Mesir, apabila terjadi perselisihan di antara para Amir, maka akan menyebabkan kepala

Ta>ri>kh al-Isla>mi>, terj. oleh Samson Rahman, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Jakarta: AkbarMedia, 2009), 313.

⁵⁴Menurut Ah}mad al-‘Usayri>, terdapat empat hal yang menjadi penyebab perselisihan itu, yaitu (1) karena mereka datang dari wilayah yang berbeda-beda, (2) mereka terpisah dari rakyat, (3) perasaan *inferiority complex* mereka yang menyatakan bahwa dirinya berasal dari budak-budak yang dibeli, (4) dan ambisi mereka untuk berkuasa. Ah}mad al-‘Usayri, *al-Ta>ri>kh al-Isla>mi>*, 302.

⁵⁵Wan Kamal Mujani, “Sistem Khalifah Pada Zaman Mamluk dan Analisis Terhadap Para Khalifah Dari 872 H/ 1464 M Sehingga 922 H/ 1517 M,” *International Journal of West Asian Studies*, Vol. 4, No. 1 (2012), 18, http://www.ukm.my/ijwas/images/koleksi_jurnal_pdf/vol4_n1_2012a/2_Sistem_Khilafah_Artikel.pdf (diakses 22 Agustus 2015).

08/12/na6jd949-bom-atom-dan-kemerdekaan-ri (diakses 9 November 2015).

⁵²Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 255-256.

⁵³Menurut Ah}mad al-‘Usayri>, terdapat lima faktor yang menjadi penyebab kehancuran pemerintahan Mamluk, yaitu: (1) karena mereka meninggalkan Jihad, (2) terjadi perpecahan dan konflik internal, (3/4) kegagalan dalam membentengi pasukan Portugis, (5) dan kekalahan mereka melawan pasukan ‘Uthma>ni>. Ah}mad al-‘Usayri, *al-*

menggelinding di jalanan, darah orang yang tidak bersalah berceceran, rumah ditutup dan dibakar serta masjid dihancurkan. Sebagaimana juga perintah Sultan yang tertera di dalam lembaran pengumuman, yaitu:

يا أهالي مصر. ما زالت الوحشة والقطيعة مستمرة. بين الأمير طشتمر والأمير خيربك. وكل منهم مترصد للآخر. فانتهوا..

Artinya:

Wahai rakyat Mesir! Pengasingan dan pemisahan masih berlangsung. Antara Amir T{ashtamur dan Amir Kha>yrbak. Masing-masing dari mereka mengintai yang lain. Jadi, berhati-hatilah..

Ketika Sa‘i>d al-Juhayni> berkunjung ke rumah al-Zayni> selepas Salat Subuh, ia disambut oleh penjaga rumahnya orang Nubia. Kata orang Nubia tersebut, al-Zayni> sedang tidak ada di rumah, ia menyelesaikan konflik antara anak buah Amir T{ashtamur dan Kha>yr Bak, serta kekacauan di jalan Juwa>niyah. Mereka pun mengambil kesempatan merampas toko yang ada di sana. Demikian juga perselisihan yang terjadi antara Amir Bashta>k Fu>l Maqashshar dan Amir T{ughluq, karena al-Bashta>k menghina menara baru Masjid sang Sultan dengan mengatakan beberapa menara tersebut miring.⁵⁶

Penyimpangan politik ini terus diwariskan oleh tiap-tiap pemerintahan yang baru. Mulai dengan adanya pembantaian dan pembunuhan sebagaimana rezim sebelumnya. Faktanya, periode ini dalam sejarah Suriah-Mesir merupakan periode yang gelap. Sebagian Sultan bertindak kejam dan curang, dan tidak beretika. Sebut saja salah satunya Sultan Qa>y Ba>y (1468-1495 M) yang memotong lidah ahli kimia ‘Ali> ibn al-Marshu>shi> karena gagal mengubah logam menjadi emas.⁵⁷

Al-Zayni> Baraka>t pun juga yang mendapatkan perlawanan politik dari rekannya sendiri karena sikap al-Zayni> yang *pro*-rakyat. Para Amir merasa kesal dengan sikap al-Zayni> yang tidak akan membunuh dan menghukum gantung siapa saja yang terlambat mengembalikan uang Sultan, dan memberikan keleluasan kepada mereka yang terlambat membayar. Menanggapi hal itu, para Amir menemui dan berbicara langsung dengan Sultan. Sultan mengatakan: أنتم هكذا إذا ما ظهر إنسان (kalian memang seperti itu, jika ada orang yang menginginkan keadilan, kalian melawannya). Kemudian, ketika mereka melewati kesopanan, Sultan pun marah dan mengatakan:

والله أخلع نفسي وتسلموها أنتم خربة بورا، الخزائن خاوية وابن عثمان متحرش بنا، العامة لا يهدأون...⁵⁸

Artinya:

Aku bersumpah akan melepaskan jabatan ini dan kalian dapat menerima daratan yang hancur ini, berangkas kosong. Ottoman lagi menyerang kita yang mengakibatkan rakyat menjadi tidak tenang...

Selain dari itu, menurut pengamatan petualang Visco Gianti pada bulan Zulkaidah 920 H, Abu> al-Khayr al-Mura>fi‘ langsung menemui Sultan dan menuduh al-Zayni> mengambil uangnya sebesar 60.000 dinar.⁵⁹

Sebagai negara yang bermasalah dari segi moral nasional, demikian juga ia bermasalah juga dari segi dukungan rakyat. Hal itu terlihat sebagaimana peran al-Zayni> membebaskan seorang gadis *Rumi*, dari tangan lelaki tua, al-‘At>t}a>r (baca: pahlawan masyarakat). Dalam menyikapi itu, tidak semuanya masyarakat mendukung atas keputusannya, sebagian ada yang menganggap tindakan tokoh ini tepat, tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa dia terlalu jauh ikut campur dalam

⁵⁶Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 23, 85, 120 dan 109.

⁵⁷Philip K. Hitti, *History of the Arab; From the Earliest Times to the Present*, terj. oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of*

the Arab (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 889-890.

⁵⁸Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 253-254.

⁵⁹Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 202.

urusan pribadi rumah tangga seseorang. Apalagi terdengar isu bahwa gadis tersebut tidak pernah meminta bantuannya. Bahkan, para pria mengatakan bahwa al-‘At}t}a>r dianiaya dan dia tidak bersalah, sebagaimana dalam teks berikut:

أن العطار مظلوم وليس عنيفاً، وتساءل الرجال هل توجد امرأة تكره هيئة رجل كهينة العطار، البنت فعلا لعوب وكرهته، استغاثت بالزيني بركات لتهرب منه لسبب خفي عندها.⁶⁰

Padahal, sebelum mengambil keputusan tersebut, al-Zayni> terlebih dahulu bermusyawarah dengan ulama.

Termasuk juga dengan sikap *pro-rakyat* al-Zayni> dan menegakkan keadilan, sebagaimana sedikit telah disinggung di atas, tidak sepenuhnya dapat diterima oleh para Amir. Para Amir (dalam novel ini tidak disebutkan nama tokohnya) sengaja menghasutnya dengan Sultan. Mereka kesal dengan sikap al-Zayni> yang tidak membunuh dan menghukum gantung orang yang terlambat mengembalikan uang Sultan, termasuk juga karena memberikan keleluasan kepada mereka yang terlambat membayar. Bahkan, ke tingkat yang lebih serius, rekan politiknya (para Amir) berencana membunuhnya. Hal itulah yang dikhawatirkan Zakariyya>, sebab apabila ia terbunuh, rakyat pasti akan berduka cita dan menangisinya. Dirinya tidak mau lagi melihat kejadian yang sama seperti pada zaman kepemimpinan al-Na>s}ir bin Qala>wu>n, ketika seorang Amir T{aybugha> menegakkan keadilan dan membela orang miskin dari orang kaya, para Amir lainnya sangat marah hingga membunuhnya dengan racun.⁶¹

Berdasarkan tiga unsur di atas, jika melihat persoalan internal Mesir pasca

Nasser khususnya menjelang perperangan tahun 1967, Presiden ini berhadapan dengan golongan Islam ortodoks (sayap kanan). Dia berupaya menggunakan Islam untuk melegitimasi ideologi sosialisme dan nasionalismenya. Pada masanya, buku-buku yang berkaitan dengan sosialisme mulai diedarkan, sebagai usaha untuk menafsirkan kembali kehidupan Nabi Muh}ammad dan para sahabatnya. Menurutnya, ideologi itu dibutuhkan karena persatuan di negara Arab tidak hanya ada Muslim, tetapi juga dari agama lain. Kemudian hal inilah yang ditolak penganut aliran Islam ortodoks, mereka mempercayai negara Islam harus menjaga, menyiarkan, berjuang, dan melaksanakan syariat Islam. Oleh sebab itu, pasca kekalahan Arab pada perang enam hari, mereka secara spontan menyalahkan Presiden dan menganggap kekalahan itu hukuman Tuhan kepada Arab karena terlalu meyakini ideologi asing.⁶²

Termasuk juga Nasser menghadapi tantangan besar masanya, terutama dari pihak Ikhawa>n al-Muslimi>n, sebuah gerakan Islam yan menolak ideologi baru bagi Mesir dan mempertahankan kembali syariat Islam. Meskipun pada awal-awal pemerintahan presiden ini gerakan ini mendukung pada revolusi Mesir, tetapi pada belakangan memisahkan diri dari pemerintah, dan bahkan lama kelamaan menjadi gerakan oposisi cenderung ke arah kekerasan. Selanjutnya, persaingan juga berkembang dari dari Saudi Arabia, terutama Faysa>l memakai Islam atau yang disebut juga pan-Islam untuk menentang sosialisme Arab atau yang dikenal dengan istilah pan-Arabisme. Ketika Faysa>l memperoleh dukungan dari ulama mereka, dalam kesempatan yang sama memperoleh dekrit dari ulama terkemuka al-Azhar. Sewaktu Faysa>l

⁶⁰Terjemahannya: Sesungguhnya al-‘At}t}a>r dianiaya dan dia tidak bersalah, para pria itu bertanya, apakah ada wanita yang membenci laki seperti al-‘At}t}a>r... Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 12.

⁶¹Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 253 dan 191.

⁶²John L. Esposito (*ed.*), *Islam and Development Religion and Sociopolitical Change*, terj. oleh A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 182-185.

menegaskan bahwa pan-Arabisme termasuk pan-Islam, sebaliknya Nasser menegaskan sosialisme itu berakar dari Islam.⁶³

Presiden sudah berusaha untuk mewujudkan persatuan Arab. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada periodenya, buku keislaman sudah banyak beredar sebagai upaya menanamkan ideologi sosialismenya. Meskipun demikian, penanaman itu tidaklah pada seluruh aspek keislaman, tetapi hanya dalam aspek pembaharuan Islam, seperti bidang sosial-politik dan ekonomi. Sebabnya, Islam akan tetap hidup karena fahamnya hanya memberikan tekanan kepada aspek itu untuk membendung dari ide-ide dari kelompok radikal. Menurutny, revolusi ideologi tersebut merupakan inti dakwah Islam, apabila meninggalkan sosialisme, maka akan berdampak pada kemunduran Islam sendiri.⁶⁴

Kembali ke persoalan Nasser, baik itu moral nasional maupun dukungan rakyat, masa ini boleh dikatakan bermasalah kedua-duanya. Pada pasca sebelum perang tahun 1967, Presiden ini disibukkan dengan perbaikan internal menghadapi kaum ortodoks, demikian juga setelah kekalahan perang itu sampai ke pemerintahan Sadat, malah kelompok ini menyalahkan ideologi Barat. Selain dari IM, sebut saja misalnya *Jama* > 'at al-*Isla* > miyah, kelompok ini berusaha menciptakan kembali sebuah masyarakat Islamis dengan jalan pemulihan sistem khalifah. Berawal dari pembentukan kelompok penyair, pelukis, pembaca al-Quran dan kelompok-kelompok lainnya. Dengan bantuan militer, organisasi ini dalam bentuk gerakan pelajar melawan pengaruh komunis.⁶⁵

⁶³John L. Esposito, *Islam and Politics*, terj. oleh H.M. Joesoef Sou'yb, *Islam dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 178 dan 180.

⁶⁴John L. Esposito (ed.), *Islam and Development Religion and Sociopolitical Change*, 184-185.

⁶⁵Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* terj. oleh Ghufon A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Ummat*

5. Kualitas Diplomasi

Hampir tidak ada di dalam kisah ini disebutkan diplomasi yang dijalankan pemerintah untuk mempertahankan Dinasti Mamluk. Pemerintahnya hanya sibuk dengan perbaikan persoalan internal dengan menunjuki al-Zayni > untuk tugas itu. Pada tanggal 10 Syawal 912 H, Sultan melantiknya sebagai *Muh}tasib* Kairo sehingga tugas pentingnya adalah memberikan kenyamanan kepada banyak orang. Dalam menegakkan keadilan, tidak ada yang ditakutkan, kecuali Allah, sehingga status sosial tidak menghalangi tugasnya. Termasuk juga rumahnya menjadi tempat pengaduan selama 24 jam, sehingga tidak ada yang menghalanginya dengan rakyat. Ia mengunjungi propinsi-propinsi yang berada di Mesir Utara dan Selatan kemudian di setiap jalan, desa dan kota ditempatkan petugas yang mengawasi, menertibkan dan memeriksa ketidakadilan serta melaporkan kepada dirinya.⁶⁶

Demikian juga dengan Nasser sendiri tidak melakukan langkah diplomasi bilateral misalnya dengan Israel soal perbatasan. Ia hanya memperkuat pan-Arabisme di Mesir dan hanya menjalin kerja sama dengan negara yang terlibat dalam UAR.⁶⁷ Sementara terhadap ideologinya, tidak semua elemen yang setuju (sebut saja IM yang menentang ideologi ini). Dalam kasus Indonesia misalnya pada penyelesaian Batas Landas Kontinen (BLK) dengan Vietnam. Persoalan ini sudah mulai dibicarakan semenjak 1978, tetapi sampai tahun 2002 belum juga selesai. Akhirnya, tanggal 26

Islam Bagian Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 132.

⁶⁶Gamal al-Ghitani, *al-Zayni* > *Baraka* > t, 62-63.

⁶⁷Nasser juga tidak melakukan diplomasi dengan negara yang ditakuti Amerika saat ini, Iran. Muhammad Ibrahim Hamdani, "Konflik Suriah dan Politik Diaspora Iran," *NU Online*, 21 November 2013, <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,pdf-ids,4-id,47669-lang,id-c,kolom-t,Konflik+Suriah+dan+Politik+Diaspora+Iran-.phpx> (diakses 15 November 2015).

Juni 2003 di Istana Kepresidenan Vietnam Hanoi, ditandatangani persetujuan kedua negara terhadap BLK.⁶⁸

Kembali ke persoalan Nasser, untuk memperkuat sosialismenya, ia menggunakan Islam sebagai keabsahan ideologi tersebut. Demikian juga dia menanamkan nilai-nilai itu melalui buku-buku dan meminta dukungan tokoh-tokoh al-Azhar. Di dalam negeri, ia fokus menghadapi tantangan keras dari IM, yang menolak jalan sekuler ala Barat bagi Mesir. Justru, Islam lebih drastis peningkatannya dibandingkan penanaman sosialis, baik dalam maupun luar negeri. Selama tahun 1960-an, tokoh ini mendapatkan saingan dari sosialis Arab lainnya: Suriah, Irak dan Aljazair, termasuk juga konservatif ialah kerajaan Arab Saudi yang negaranya kaya akan minyak.⁶⁹

6. Dimensi Kemampuan Ekonomi

Sejarahnya, salah satu penyebab kehancuran Dinasti ini adalah melemahnya sistem ekonomi. Sebagaimana di masa kejayaannya, Dinasti ini memegang peran penting dalam meraup keuntungan yang banyak, terutama dalam hal menetapkan bea cukai yang tinggi dari jalur perdagangan antara Barat dan Timur. Akan tetapi, perekonomian negara ini mulai melemah setelah jalur perdagangan itu tidak lagi melewati wilayah ini. Sementara di dalam

⁶⁸Kesepakatan itu dipicu oleh perkataan Aiyub Mohsin (termasuk salah satu diplomat Indonesia) kepada Ambassador Le Con Phung (yang akan menjadi Ketua Delegasi Vietnam pada perundingan tanggal 5-7 Juni 2003). Diplomasi inilah yang disebutnya sebagai “diplomasi lewat golf,” karena hal itu disampaikan ketika bermain golf tanggal 1 Juni 2003 di Denpasar-Bali. Dia mengatakan: Delegasi Indonesia sangat senang mengunjungi kota-kota di Vietnam, jika BLK antara kedua negara ini termasuk juga EEZ (Exclusive Economic Zone), maka tidak akan ada lagi perundingan dan Delegasi Vietnam juga tidak bisa lagi mengunjungi lagi kota-kota di Indonesia. Aiyub Mohsin, dkk., *Diplomasi dalam Aksi* (Bandung: CV. Angkasa, 2008), 105-122.

⁶⁹John L. Esposito, *Islam and Politics*, 177-178.

novel ini, secara jelas novelis al-Ghitani menggambarkan hal tersebut dan menjadi tugas penting dari perjuangan al-Zayni>, yaitu sebagai pengontrol harga pasar. Seperti halnya dalam ungkapan Sultan memarahi para Amir karena memusuhi al-Zayni>:

...وتجار الفرنجة ما عادوا يعبرون من الإسكندرية إلى
دمياط، خسرونا...⁷⁰

Artinya:

...Pedagang *Frank* tidak lagi menyeberang dari Alexandria ke Damietta yang membuat kita kehilangan pemasukan...

Biasanya, para pedangan *Frank* melewati wilayahnya, sedangkan sekarang tidak lagi, sebagai akibatnya mereka kehilangan pemasukan.

Demikian juga yang terjadi era Nasser, kekalahan perang 1967 disebabkan juga oleh lemahnya sistem ekonomi negara ini. Ekonomi Israel beserta sekutunya lebih baik dibandingkan ekonomi UAR. Sekaligus menjadi pertimbangan juga bahwa kekalahan Israel perang selanjutnya tahun 1973, apabila dilihat dari sisi ekonomi, karena ekonomi negara ini tertanggung. Kemenangan bangsa Arab waktu itu disebabkan juga oleh pengaruh pemboikotan minyak oleh Arab Saudi. Sebagai yang menyatakan penerapan sepenuhnya terhadap prinsip Islam, Allah memberikan kemenangan kepada Islam dengan jalan kekayaan minyak yang mereka miliki.⁷¹

C. Penutup

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Nasser terlalu disibukkan dengan mengontrol pengaruh pan-Islamisme menjelang perang tahun 1967 untuk menanamkan pan-Arabisme (persatuan negara Arab dengan ideologi sosialismenya untuk menghadapi Israel). Problematika itu mirip dengan peran Sultan dalam kisah

⁷⁰Gamal al-Ghitani, *al-Zayni> Baraka>t*, 253-254.

⁷¹John L. Esposito, *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change*, 188.

ini, yaitu fokus pada perbaikan sistem internal Mamluk dan mengesampingkan kekuatan Ottoman yang di luar prediksi. Selain dari itu, baik itu kisah akhir Mamluk dalam novel ini dan negara Mesir menjelang peperangan tahun 1965, kesiagaan militer (kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata), moral nasional, kualitas diplomasi, kualitas pemerintah (masalah dukungan rakyat), dan kemampuan ekonomi negara ini lemah. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi Israel pada peperangan tersebut, negara ini kurang dalam persiapan dan perencanaannya.

D. Daftar Pustaka

- Allen, Roger. review of Egyptian Writers Between History and Fiction: Essays on Naguib Mahfouz, Sonallah Ibrahim & Gamal al-Ghitani, by Samia Mehrez. *Middle East Studies Association Bulletin*, Vol.29, No. 1 (1995): 126-127, <http://www.jstor.org/stable/23061288> (diakses 4 Juni 2014).
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Asmardika, Rahman. "Perang Enam Hari 1967, Israel Kalahkan Negara Arab." *Okezone.com*, 5 Juni 2015, <http://news.okezone.com/read/2015/06/04/18/1160396/perang-enam-hari-1967-israel-kalahkan-negara-arab> (diakses 9 November 2015).
- 'A<shu>r, Sa'i>d 'Abd al-Fatta>h}. *al-'As}r al-Mama>li>ki> fi> Mis}r wa-al-Sha>m*. Kairo: Da>r al-Nahd}ah al-'Arabiah, 1976.
- Barry, Peter. *Beginning Theory, an Introduction to Literary and Cultural Theory*. Manchester: Manchester University Press, 1995.
- Coplin, William D. *Introduction to International Politics*, terj. oleh Marsedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV. Sinar Baru, 1992.
- Eagleton, Terry. *Marxis and Literary Criticism*. London: Taylor & Francis e-Library, 2006.
- . "Two Approaches in the Sociology of Literature." *Critical Inquiry*, Vol. 14, No. 3 (1988): 469-476, <http://www.jstor.org/stable/1343699> (diakses 22 April 2015).
- Elias, Elias A. *Modern Dictionary Arabic-English*. Egypt: Elias' Modern Press, 1954.
- Esposito, John L. (ed.). *Islam and Politics*, terj. oleh H.M. Joesoef Sou'yb, *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- . *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change*, terj. oleh A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- al-Fa>khu>ri>, H{anna>. *Ta>ri>kh al-Adab al-'Arabi>*. tt: al-Maktabah al-Bu>lisiyah, 1987.
- Ginting, Selamat. "Bom Atom dan Kemerdekaan RI." *Republika Online*, 12 Agustus 2014, <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/12/na6jd949-bom-atom-dan-kemerdekaan-ri> (diakses 9 November 2015).
- Hafez, Sabry. review of Touching on Taboos Zayni Barakat by Gamal al-Ghitani; Farouk Abdel-Wahab. *Third World Quarterly*, Vol. 11, No. 4 (1989): 305-308, <http://www.jstor.org/stable/3992355> (diakses 4 Juni 2014).
- Hamdani, Muhammad Ibrahim. "Konflik Suriah dan Politik Diaspora Iran." *NU Online*, 21 November 2013, <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,pdf-ids,4-id,47669-lang,id-c,kolom-t,Konflik+Suriah+dan+Politik+Diaspora+Iran-.php> (diakses 15 November 2015).
- Hitti, Philip K. *History of the Arab; From the Earliest Times to the Present*, terj. oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of the Arab*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- al-Jābirī, Mutaqaddam. "Jama>liyāt al-Ta'āluq al-Nas}s}ī fī Riwāyat "al-Zaynī

- al-Barakāt” li-Jamāl al-Ghīt}ānī." *Majallat Kullīyat al-Ādāb wa-al-Lughāh*, Vol. 8, tn (2011): 1-29, http://fil.univ-biskra.dz/images/pdf_revue/pdf_revue_08/metakadem%20djebairi.pdf (diakses 18 Mei 2014).
- Jones, Walter S. *The Logic of International Relations*, terj. oleh Budiono Kusumohamidjojo, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.
- Kamil, Sukron. *Naji>b Mah}fu>z}: Sastra, Islam, dan Politik (Studi Semiotik Terhadap Novel Aula>d Ha>ratina>)*. Jakarta: Dian Rakyat, 2013.
- . *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kurtulus, Ersun N. "the Notion of a "Pre-emptive War:" the Six Day War Revisited." *Middle East Journal*, Vol. 61, No. 2 (Spring 2007): 220-238, <https://kar.kent.ac.uk/1547/1/Kurtulus.pdf> (diakses 4 September 2015)
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, terj. oleh Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Lesmana, Maman. "Learning History from Novel: A Case Study in Arabic Literature." *Tawarikh*, Vol. 6, No. 1 (2014): 83-92, http://tawarikh-journal.com/wp-content/uploads/1970/01/08.males_ui_id_10.14.pdf (diakses 11 Maret 2015).
- Manshur, Fadlil Munawwar. "Teori Sastra Marxis dan Aplikasinya pada Penelitian Karya Sastra Arab." *Bahasa dan Seni*, Vol. 40, No. 1 (2012): 122-134, <http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/11-Fadlil-Munawwar.pdf> (diakses 26 April 2015).
- Mehrez, Samia. *Egyptian Writers between History and Fiction: Essay on Naguib Mahfouz, Sonallah Ibrahim, and Gamal al-Ghitani*. Kairo: The American University in Cairo Press, 2005.
- Mohsin, Aiyub dkk. *Diplomasi dalam Aksi*. Bandung: CV. Angkasa, 2008.
- Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf, 1948.
- . *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, terj. oleh S. Maimoen, dkk., *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Mujani, Wan Kamal. "Sistem Khalifah Pada Zaman Mamluk dan Analisis Terhadap Para Khalifah Dari 872 H/ 1464 M Sehingga 922 H/ 1517 M," *International Journal of West Asian Studies*, Vol. 4, No. 1 (2012): 13-30, http://www.ukm.my/ijwas/images/koleksi_jurnal_pdf/vol4_n1_2012a/2_Sistem_Khalifah_Artikel.pdf (diakses 22 Agustus 2015).
- Mushtaq, Sadia dan Ishtiaq Ahmad Choudhry. "Conceptualization of Foreign Policy An Analytical Analysis." *Berkeley Journal of Social Science*, Vol.3, tn (2013): 1-21, <http://www.berkeleyjournalofsocialsciences.com/spring4.pdf> (diakses 15 November 2015).
- Panikkar, K. N. "Literature as History of Social Change." *Social Scientist*, Vol. 40, No. 3/4 (2012): 3-15, <http://www.jstor.org/stable/41633799> (diakses 10 Mei 2014).
- Pradopo, Rachmat Djoko. *Kritik Sastra Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- al-Rah}ma>n, Al-‘Ala>mah Wali> al-Di>n ‘Abd bin Muh}ammad Ibn Khaldu>n. *Muqaddimah Ibn Khaldu>n*. Damaskus: Da>r Ya‘rab, 2004.
- Rudy, Teuku May. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Sabra, Adam. review of H{isba, Arts and Craft in Islam, by Ahmad Ghabin. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 22, No. 2 (2011): 252, doi:10.1093/jis/etr007 (diakses 3 Januari 2015).
- Sriyono, A. Agus (ed.). *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran*

- Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- al-'Usayri, Ahmad. *al-Ta'rikh al-Islami*, terj. oleh Samson Rahman, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: AkbarMedia, 2009.
- Utama, Prasetya *Sastra dan Politik*. Jakarta: Universitas Trisakti, 1993.
- Wellek, René. "Hippolyte Taine's Literary Theory and Criticism." *Criticism*, Vol. 1, No. 1 (1959): 1-18, <http://www.jstor.org/stable/23091097> (diakses 19 Februari 2015).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Zaenuddin, Mamat dan Yayan Nurbayan. *Pengantar Ilmu Balaghah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Zaidan, Abdul Razak (ed.). *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.